



RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
Senin, 14 Juli 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No :

| PANGGILAN | JENIS | NOMOR | DERAJAT |
|--|-------|-------|---------|
| DARI : MENTERI DALAM NEGERI | | | |
| UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA | | | |
| TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI | | | |

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA
Nomor : 500.2.3/3772/SJ

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

- AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR *ONLINE* PD HARI SENIN TGL 14 JULI 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DGN *MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD* INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL *YOUTUBE* KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA
- BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA
- CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA
- SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA
- DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA
- TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA
- EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DI INFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA
- LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI *DRESS CODE* PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA
- DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA
- EEE TTK DUM TTK HBS

TANGGAL PEMBUATAN 12 Juli 2025

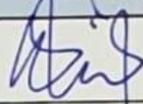
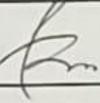
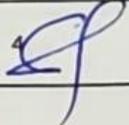
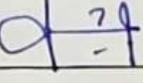
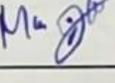
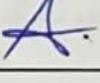
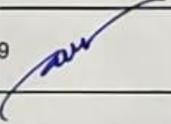
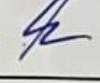
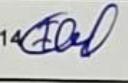
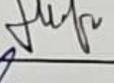
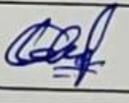
| | | | | | |
|--|----------|-------------|-------|-------------|----------------|
| Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL | No. Kode | Waktu/pukul | | Lalu Lintas | Paraf Operator |
| Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsu Tohir | | Terima | Kirim | | |
| Tanda Tangan : | | | | | |

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi via zoom

Hari/Tanggal : Senin / 14 Juli 2025

| NO | NAMA | INSTANSI/SKPD | L/P | TANDA TANGAN |
|----|----------------|-------------------|-----|--|
| 1 | Kari Latama | Asisten 2 | P | 1  |
| 2 | Rio andini | | | 2  |
| 3 | Fahmah | | | 3  |
| 4 | Eddy Sabar | Deslub | L | 4  |
| 5 | Siti Fauziah | Bapperida | P | 5  |
| 6 | M. Suryadi | Diskep um & rekre | L | 6  |
| 7 | Mulyani | Inspektoral | L | 7  |
| 8 | KRISMAN | Diskominfo | L | 8  |
| 9 | Arief R.H | BPKAD | L | 9  |
| 10 | Penny Zudiarni | Disperkim | P | 10  |
| 11 | Lini Zuhayyah | | | 11  |
| 12 | Ido | Umum | | 12  |
| 13 | dino | - 11 - | | 13  |
| 14 | Endah | - 11 - | | 14  |
| 15 | Indra | Perekonomian | | 15  |
| 16 | Vivis | BSN | | 16  |
| 17 | Tedy | Satpol | | 17  |
| 18 | Galot | - 11 - | | 18  |
| 19 | | | | 19 |

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/3772/SJ Tanggal 12 Juli 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat :

Senin, 14 Juli 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **Badan Pangan Nasional**
 - a) Realisasi penyaluran beras SPHP Tahun 2025 sebesar 12,08% atau 181,2 ribu ton dari total pagu tahun 2025 1,5 juta ton.
 - b) Peran pemerintah daerah dalam SPHP beras
 - Koordinasi Intensif: koordinasi dengan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang perum bulog di penyaluran sphp beras dan bantuan pangan beras.
 - Optimalisasi penyaluran: masifkan penyaluran pedagang kios pasar tradisional, GPM dan koperasi KDMP dan outlet/kios pangan binaan pemda.
 - Dokumentasi & Pemantauan: dokumentasikan dan penyebaran informasi/berita kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan bersama satgas pangan Polri.
 - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,64 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah
 - Penyaluran beras SPHP
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025
 - Gerakan pangan murah (GPM)
 - Panel harga pangan
 - Kios pangan sebanyak 1.045 unit
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan
 - B2SA go to school, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar
 - Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi
 - d) Rapat terbatas bersama Presiden RI tanggal 2 Juni 2025 tentang stimulus ekonomi Tw. II tahun 2025, diputuskan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu paket kebijakan untuk penebalan bantuan sosial.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

2. Badan Pusat Statistik

- a) Inflasi bulan ke bulan 0,19% (Juni 2025 terhadap Mei 2025), inflasi tahun ke tahun 1,87% (Juni 2025 terhadap Juni 2024) dan inflasi tahun kalender 1,38% (Juni 2025 terhadap Desember 2024).
- b) Pada M2 Juli 2025, tercatat 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 2 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.
- c) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 Juli 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.
- d) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Kupang dengan nilai perubahan IPH 4,21%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras dan bawang merah.
- e) Secara nasional, rata-rata harga minyakita pada M2 Juli 2025 berada di atas HET, secara umum harga minyakita s.d. M2 Juli 2025 turun 0,20% dibanding Juni 2025.

3. Bulog

- a) Realisasi pengadaan GKP sebesar 3,7 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 726 ribu ton, jadi total pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 2.765.051 ton. Pengadaan gabah pada periode ini mencapai 75% dari total realisasi pengadaan beras, tingginya proporsi pengadaan gabah ini mencerminkan fokus strategi Bulog dalam mendukung petani secara langsung.
- b) Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli-Desember 2025, adapu pagu penyaluran SPHP sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun 2025.
- c) Jumlah penerima bantuan pangan tahun 2025 sebanyak 18.277.083 PBP dengan total kuantum untuk 2 alokasi (Juni-Juli) sebanyak 365.541.660 kg.

4. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

- a) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh kementerian pertanian dan satgas pangan di 10 provinsi, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
 - Mutu kualitas produk
 - Berat netto tidak sesuai label
 - Pelanggaran harga eceran tertinggi (HET)
 - Izin edar tidak sesuai standar/ketentuan

Untuk beras medium terdapat 95,12 % yang tidak sesuai HET atau melebihi HET, 88,24 % tidak sesuai regulasi dan 9,38 % tidak sesuai berat kemasan.

Untuk Beras Premium, sebanyak 85,56% tidak sesuai regulasi, 59,78% harganya berada di atas HET, dan 21,66% beratnya tidak sesuai dengan label kemasan

- b) Saran dan tindakan dari aspek hukum:
 - Penegakan hukum terhadap pelanggaran mutu dan berat
 - Pendampingan terhadap pemda dan dinas teknis terkait
 - Penegakan hukum terhadap pelaku usaha tanpa izin edar
 - Pencegahan dan edukasi hukum
 - Peningkatan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengawasan pangan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Pengamanan distribusi pangan dan perlindungan konsumen
 - Pemda wajib menetapkan regulasi teknis yang mengatur pelabelan, mutu dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran.
- c) Anomali harga beras berdampak pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat, sehingga diperlukan intervensi terpadu melalui penguatan distribusi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran mutu/kualitas, timbangan, berat, HET dan izin edar.
- d) Kejaksaan berkomitmen menjaga stabilitas pangan dan mendukung pengendalian inflasi dengan cara:
- menjaga keadilan dalam distribusi pangan;
 - melakukan tindakan preventif maupun represif atas praktik perdagangan yang merugikan masyarakat;
 - bersinergi dengan Satgas Pangan dan instansi teknis terkait
- e) Pendampingan dan asistensi hukum terpadu kepada Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola beras mulai dari distribusi, penyaluran subsidi hingga pengendalian harga beras agar tepat sasaran, sesuai hukum dan bebas dari penyimpangan.
- f) Penegakan hukum secara tegas dan pengawasan terhadap praktik-praktik perdagangan yang merugikan masyarakat seperti pelanggaran mutu/kualitas, timbangan, berat, HET, produk beras oplosan, dan izin edar guna menjaga stabilitas harga serta mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat

5. Kementerian Perdagangan

- a) Program minyak goreng rakyat merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO/Domestic Market Obligation) dari para produsen di dalam negeri terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya (bukan subsidi APBN). Setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.
- b) Realisasi DMO bulan Juni sebesar 157.952 ton, serta realisasi DMO per 10 Juli sebesar 52.912 ton yang seluruhnya dalam bentuk minyakita
- c) Tabel harga rata-rata Minyakita regional pada Juli 2025

| No | Regional | Harga (Rp/liter) | | | Perbandingan (%) | | |
|----|--------------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| | | 10-Jul | H-7 | H-30 | HET | H-7 | H-30 |
| 1 | Nasional | 16.687 | 16.686 | 16.838 | 6,28% | 0,00% | -0,90% |
| 2 | Sumatra | 16.496 | 16.472 | 16.492 | 5,07% | 0,14% | 0,02% |
| 3 | Jawa | 16.401 | 16.418 | 16.679 | 4,46% | -0,11% | -1,67% |
| 4 | Kalimantan | 17.048 | 17.088 | 17.042 | 8,59% | -0,23% | 0,03% |
| 5 | Sulawesi | 16.290 | 16.324 | 16.320 | 3,76% | -0,21% | -0,18% |
| 6 | Bali Nusra | 17.411 | 17.592 | 17.950 | 10,90% | 1,03% | -3,00% |
| 7 | Maluku Papua | 16.976 | 16.857 | 17.290 | 8,13% | 0,71% | -1,82% |

6. Kementerian Pertanian

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- b) Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2.137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya
- c) Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- d) Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.
- e) Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri
- f) Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.
- g) Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor
- h) BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera
- i) Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

7. Kantor Staf Presiden

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 11 Juli 2025)

| | | DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH | | |
|--------------|------------|-------------------------------|--|--|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi |
| STATUS HARGA | Amar | Daging Sapi | Kedelai | Cabai Merah Keriting |
| | Waspada | Minyakita, Gula Pasir Curah | Bawang Putih, Beras Medium (Zona 2) | Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras |
| | Tidak Aman | | Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 3) | Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Daging Ayam Ras |

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 11 Juli 2025)

| Kabupaten/Kota | Jumlah Komoditas | Komoditas |
|--------------------------|------------------|---|
| Kab. Merauke | 8 | Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak |
| Kab. Jayawjaya | 8 | Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Daging Sapi |
| Kota Temate | 7 | Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras |
| Kab. Sorong | 6 | Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Kedelai, Jagung Tk Peternak |
| Kab. Nabire | 5 | Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Minyakita, Daging Sapi |
| Kota Jayapura | 4 | Bawang Merah, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras |
| Kab. Mimika | 4 | Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Jagung Tk Peternak |
| Kab. Kayong Utara | 4 | Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi |
| Kab. Sorong Selatan | 3 | Bawang Merah, Minyakita, Telur Ayam Ras |
| Kota Tual | 3 | Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah |
| Kab. Manokwari | 3 | Bawang Putih, Beras Medium, Jagung Tk Peternak |
| Kota Kupang | 3 | Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Minyakita |
| Kab. Berau | 3 | Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Daging Sapi |
| Kab. Sumba Timur | 3 | Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Minyakita |
| Kab. Belitung Timur | 2 | Bawang Merah, Daging Ayam Ras |
| Kota Adm. Jakarta Pusat | 2 | Bawang Merah, Bawang Putih |
| Kab. Sukamara | 2 | Bawang Putih, Telur Ayam Ras |
| Kab. Maluku Tengah | 2 | Beras Medium, Cabai Rawit Merah |
| Kab. Halmahora Tengah | 2 | Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras |
| Kab Timor Tengah Selatan | 2 | Daging Ayam Ras, Minyakita |
| Kota Gunungsitoli | 2 | Gula Pasir Curah, Kedelai |

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

8. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara administrasi, 99% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri.

Rekomendasi pendataan perumahan di tingkat daerah

- a) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
- b) Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Crosscheck terhadap target Unit Renovasi Rumah/Pembangunan Baru sesuai dengan informasi yang kami sampaikan.
- c) Perlu perhatian khusus Pemerintah Daerah untuk menggerakkan Pemerintah Desa dan Dinas terkait dalam melakukan pendataan perumahan.

Arahan strategis kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- a) Mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB Secara Gratis pada seluruh masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh PEMDA (Videotron, Baliho, Medsos Pemda, dll)
- b) Melakukan pendampingan kepada Desa dalam Musrembang Desa agar menganggarkan kegiatan Perumahan dalam APBDesa.
- c) Menganggarkan Pembangunan Rumah Baru/RTLH dalam APBD.
- d) Mengkoordinasikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pendataan perumahan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan turut serta berkoordinasi Kepada PemKab, PemDes, maupun Dinas/OPD terkait dengan Pendataan Perumahan.
- e) Meningkatkan pengawasan kepada Developer/Pengembang Perumahan agar perumahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam PBG dan SitePlan yang telah di sah-kan agar Masyarakat Mendapatkan Hak-Haknya.
- f) Melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai Perumahan terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan(Lahan Kas Desa, Lahan Pemerintah Daerah, Lahan Negara, Lahan Kementerian/Lembaga, Lahan Hibah Masyarakat) yang dapat digunakan untuk perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

9. Satgas Pangan Polri

- a) Tren rata-rata nasional untuk komoditas beras medium dan minyakita masih berada di atas HET, meskipun ketersediaan stok secara nasional terpantau mencukupi.
- b) Adanya dugaan gula rafinasi beredar di pasar, hal ini dapat menyebabkan kerugian di sisi petani tebu.
- c) Direkomendasikan agar memperkuat pengawasan distributor komoditas strategis (beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan dan minyakita) dengan melibatkan J/L terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketepatan sasaran distribusi.
- d) Adanya penguatan regulasi dan payung hukum terkait peredaran dan peruntukan GKR, khususnya Permendag No.17 tahun 2022, agar tidak menimbulkan tafsir yang luas.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

10. Tentara Nasional Indonesia

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Juli 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM, serbuan ter serta Kampung Bahari Nusantara.
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-2 Juli 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,55 (Deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Daging Ayam Ras (-0,5324), bawang putih (-0,2444) dan Cabai Merah (-0,0776). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Tetap menjaga distribusi pasokan Minyakita agar tidak terjadi kelangkaan stok barang di masyarakat.
- 4) Menjaga distribusi gas LPG 3kg yang saat ini terjadi kelangkaan di Kota Banjarbaru, serta melakukan monitoring ke pangkalan secara rutin
- 5) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE
NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (14 Juli 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru